

UPDATE STRATEGI DAN KEGIATAN KEKARANTINAAN KESEHATAN DI INDONESIA

Oleh:

Subdit. Kekarantinaan Kesehatan

Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen P2P

Kementerian Kesehatan RI

Makassar, 10 Mei 2017

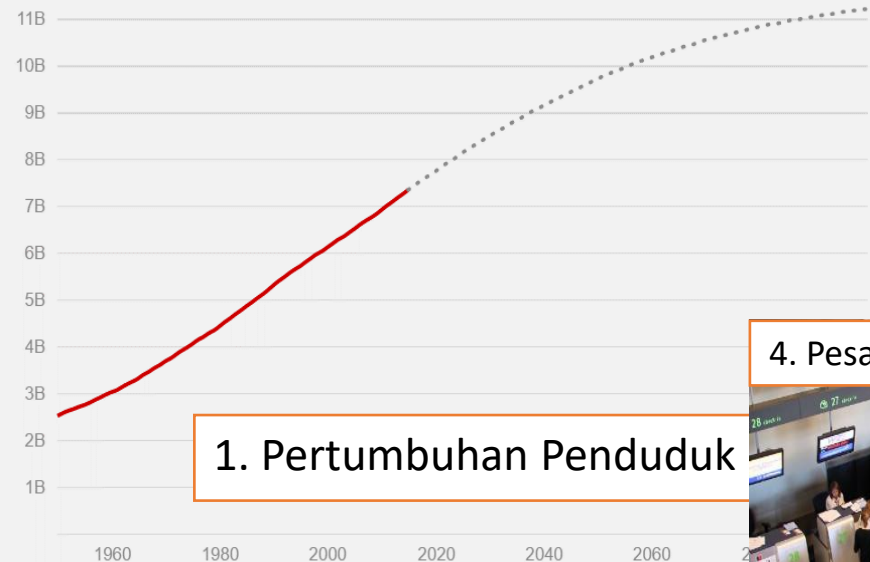
SISTEMATIKA

- Latar Belakang
- Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
- Agenda Global: IHR & GHSA
- Agenda Nasional: Kekarantinaan Kesehatan
- Surveilans Terintegrasi & Penilaian Kejadian
- Renkon & Penanggulangan KKM
- Kesimpulan

Latar Belakang: 7 Alasan Meningkatnya Risiko KKM

Rising population increases epidemic risk

The world is getting more and more crowded. Our skyrocketing population makes us more at risk for spreading deadly epidemics amongst ourselves.



1. Pertumbuhan Penduduk

2. Kehidupan Sosial dan interaksi dengan Hewan untuk ekonomi dan konsumsi



5. Ancaman vektor dan Binatang Penular penyakit



4. Pesatnya perjalanan air



3. Perubahan Iklim



6. Meningkatnya konflik sosial



7. Kemudahan Komunikasi membuat masyarakat mudah panik

Latar Belakang: Ancaman KKM

1. Penyakit virus emerging
Virus Ebola; virus Hanta;
Penyakit kaki, tangan,
dan mulut; Penyakit
virus Nipah; Penyakit
virus MERS; Demam
berdarah Crimean-
Congo; Demam Rift
Valley; Penyakit virus
baru

3. Penyakit
parasitik
emerging:
Toksoplasmosis;
Penyakit parasit
baru

5. PD3I: Polio,
Campak, pertussis,
rubella,
Gondongan,

Kimia

7. MDR:
Pneumonia
(klebsiella), TB,
Enterobacteria
ceae,

2. Penyakit Tular
Vektor : Malaria, DBD,
Chikungunya, Pes,
Laptospirosis, West
nile virus, hantavirus,
Zika dll

4. Penyakit bakteri
emerging: Botulisme;
Bruselosis;
Listeriosis;
Melioidosis; Demam
semak; Tularemia;
Penyakit bakteri baru

6. Food
Borne/Water
borne:
salmonellosis,
hepatitis A,
E.Coli,
Norovirus,
Shigellosis,
Cholera, dl

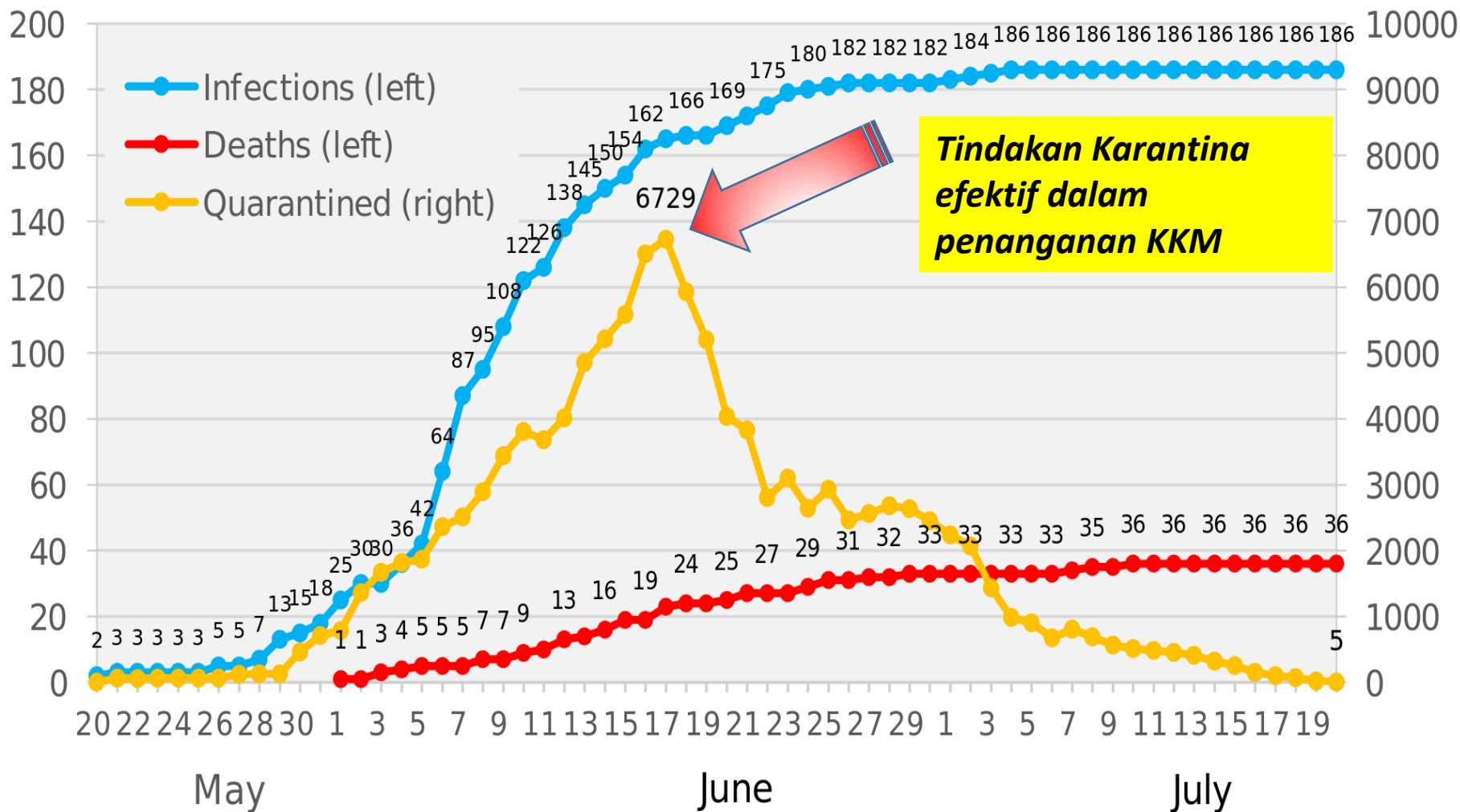
Lain
nya

Radio
nuklir

Pangan

Latar Belakang: Lesson Learned KLB

2015 MERS in South Korea



Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Merupakan kejadian kesehatan masyarakat yang

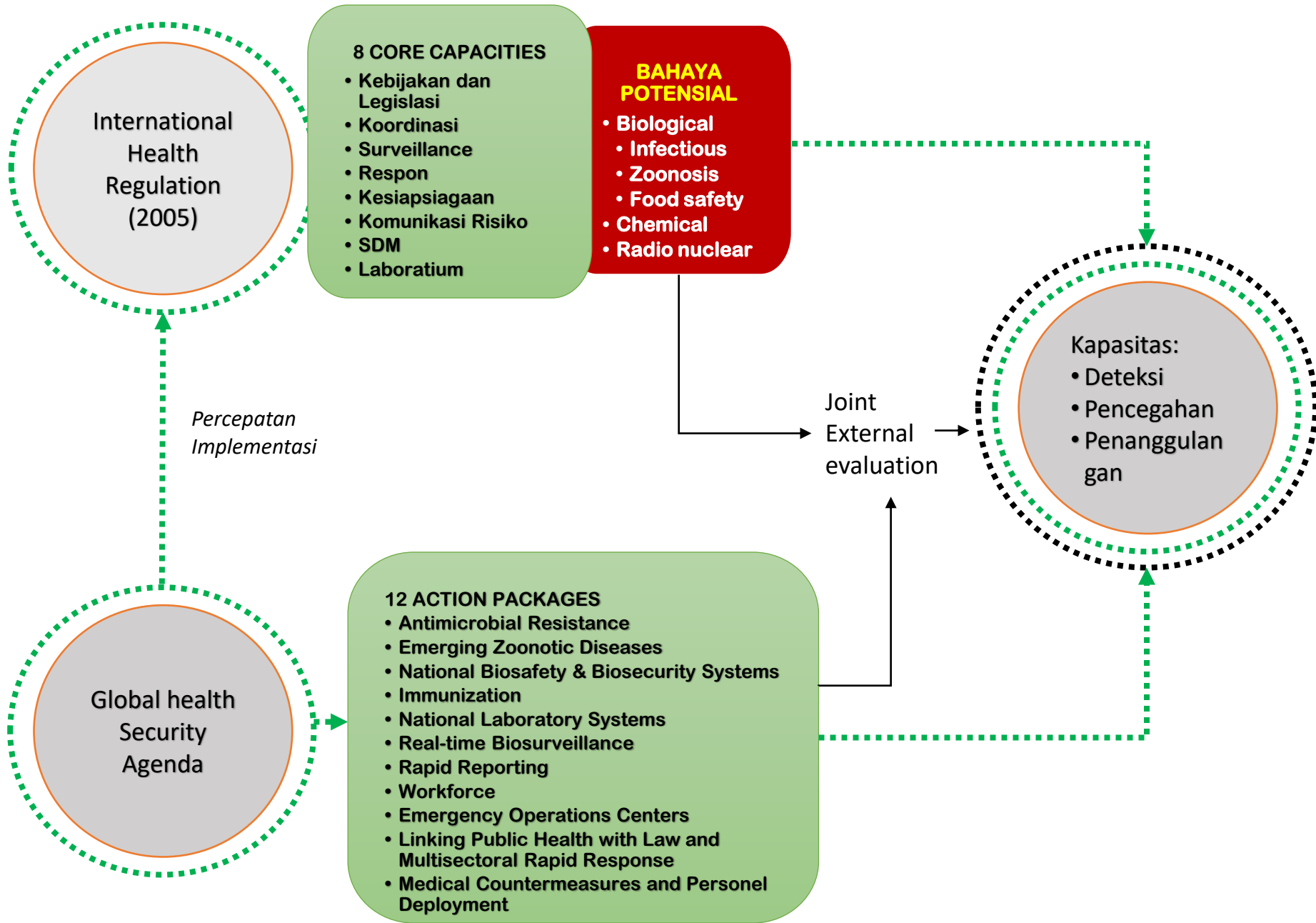
- ▶ bersifat luar biasa
- ▶ ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau
- ▶ kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, dan kontaminasi kimia (NUBIKA), dan pangan
- ▶ menimbulkan bahaya kesehatan dan
- ▶ berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

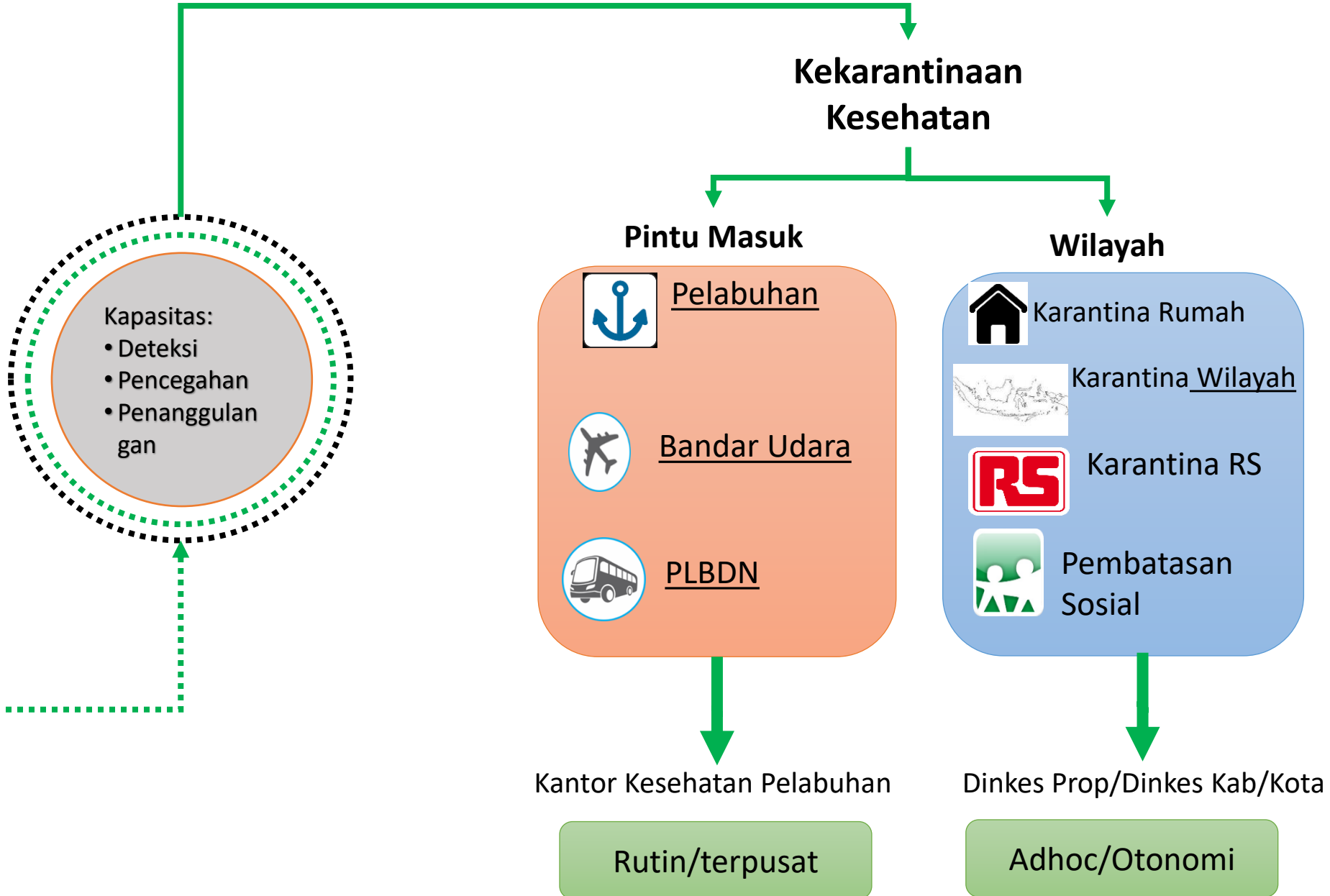
- ▶ dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah
- ▶ secara cepat dan tepat
- ▶ berdasarkan besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan yang dapat berkoordinasi dan
- ▶ bekerjasama dengan dunia internasional.

Dalam hal Kedaruratan Kesehatan Masyarakat merupakan kejadian yang meresahkan dunia, Pemerintah memberitahukan kepada pihak internasional sesuai ketentuan hukum internasional.

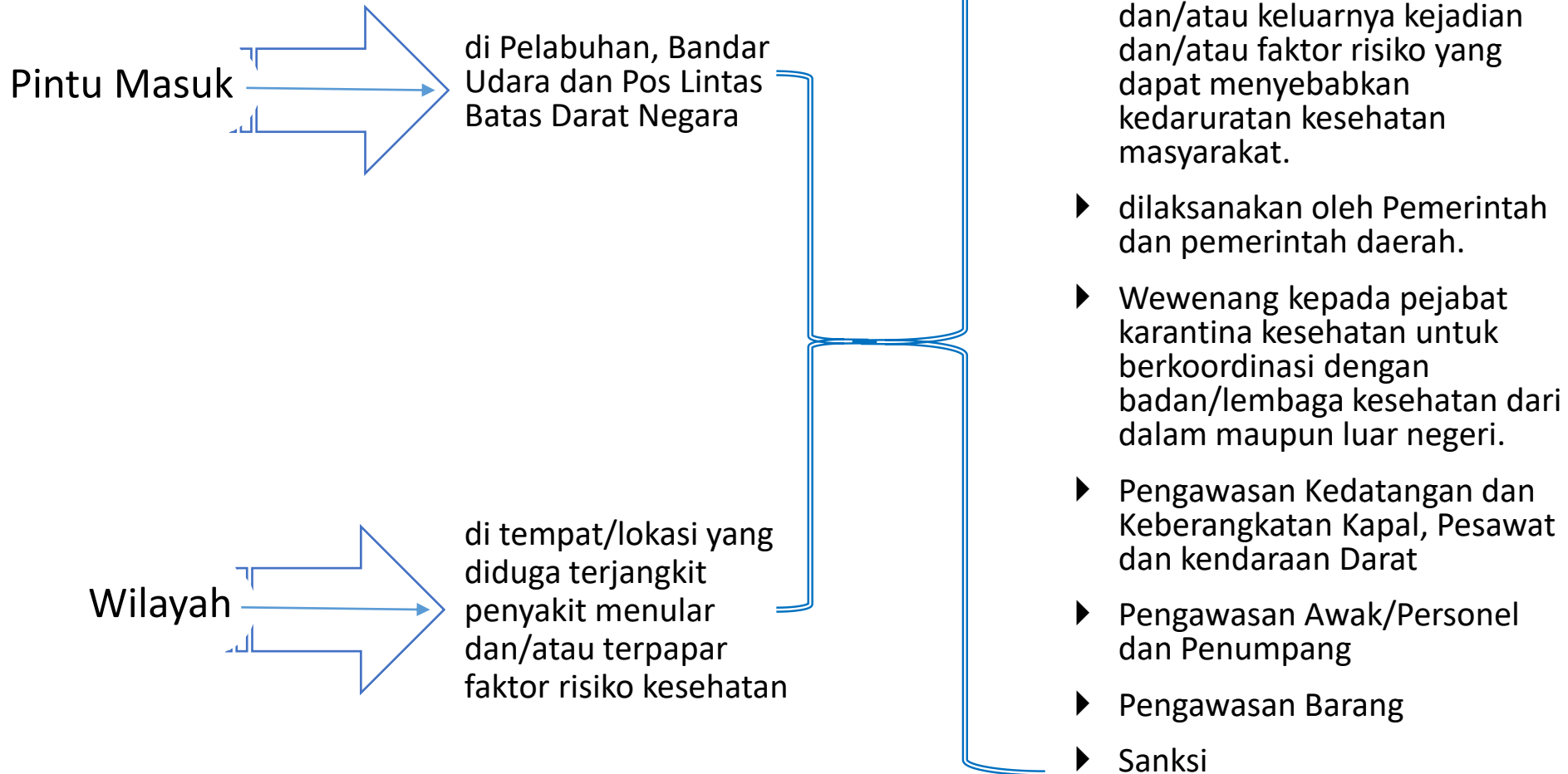
Agenda Global



Agenda Nasional



Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan

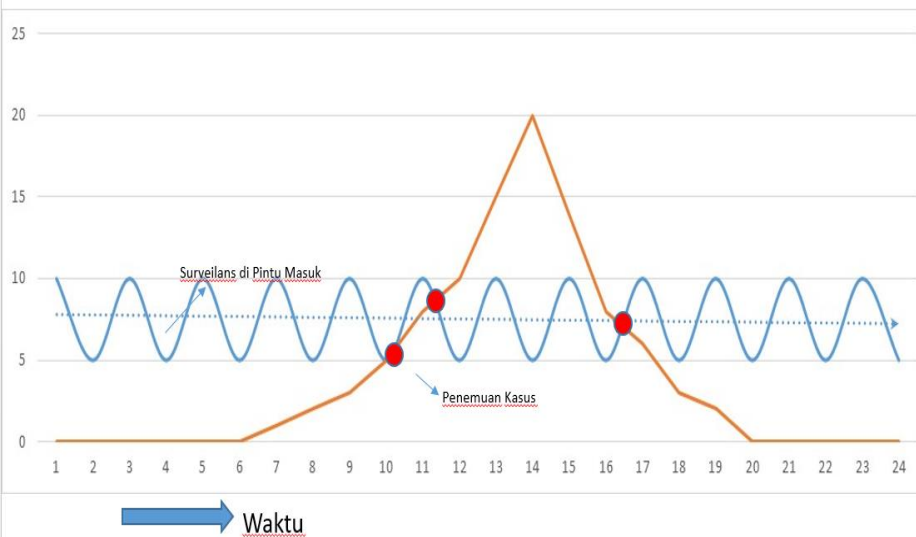


Kegiatan Kekarantinaan kesehatan

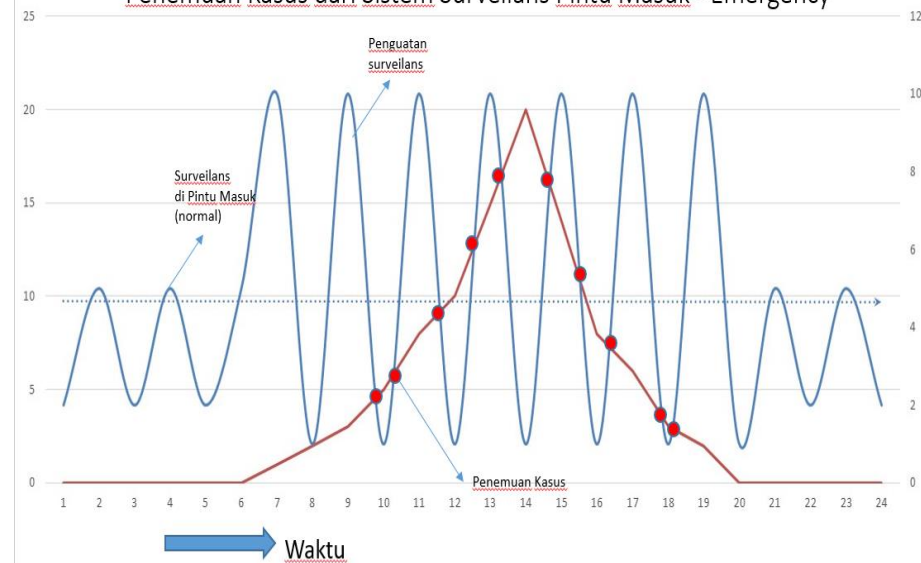
► Kegiatan

Surveilans epidemiologi penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respon terhadap Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan Kekarantinaan Kesehatan.

Penemuan Kasus dari Sistem Surveilans Pintu Masuk - Rutin



Penemuan Kasus dari Sistem Surveilans Pintu Masuk - Emergency



Kegiatan & Tindakan Kekarantinaan kesehatan

► Tindakan

berupa tindakan terhadap orang, terhadap alat angkut dan barang, pembatasan sosial berskala besar, dan/atau penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan.

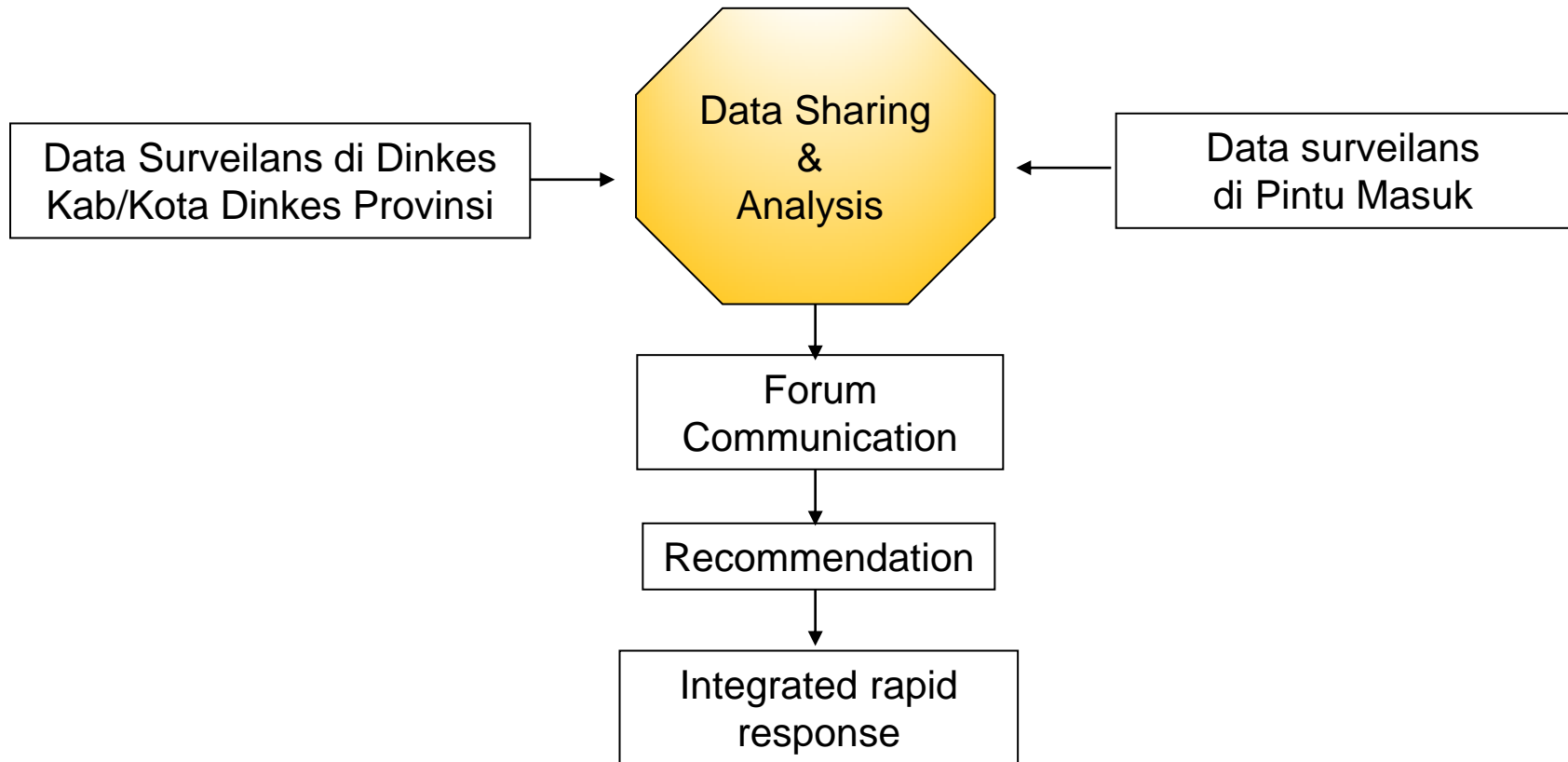
Tindakan terhadap orang:

- rujukan,
- karantina,
- isolasi

Tindakan penyehatan terhadap Alat Angkut dan Barang:

- Deratisasi,
- Desinseksi,
- Desinfeksi,
- Dekontaminasi

Sistem Surveilans Terintegrasi di Wilayah dan Pintu Masuk



ALUR PENILAIAN KEJADIAN BERPOTENSI KKM (2)

Kejadian yang terdeteksi sistem surveilans wilayah Kabupaten & Pintu Masuk

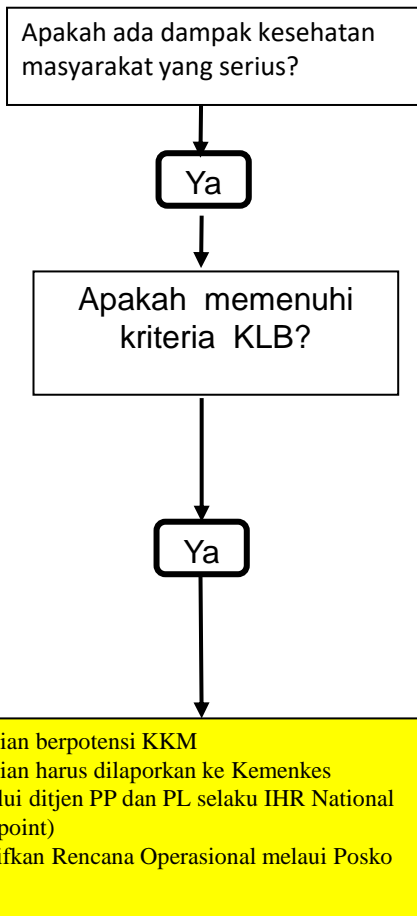
Setiap KLB yang berpotensi KKM, termasuk kejadian yang tidak diketahui penyebab dan sumbernya serta kejadian

Atau

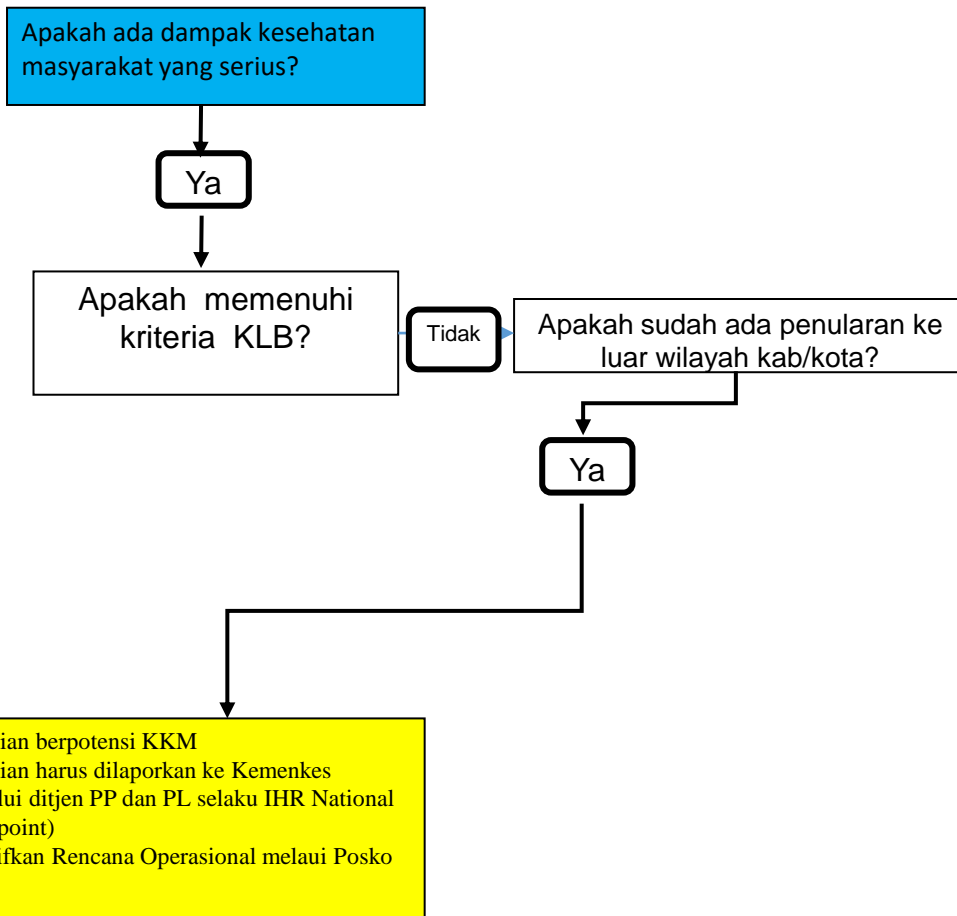
Penyakit potensial wabah sesuai Permenkes 1501 tahun 2010 tentang Penyakit Menular Tertentu yang Menimbulkan Wabah dan Kepmenkes lainnya yang menetapkan penyakit potensial wabah harus selalu dianalisa karena telah terbukti potensinya dalam menimbulkan dampak serius bagi kesehatan masyarakat dan berisiko menyebar lintas negara

Apakah ada dampak kesehatan masyarakat yang serius?

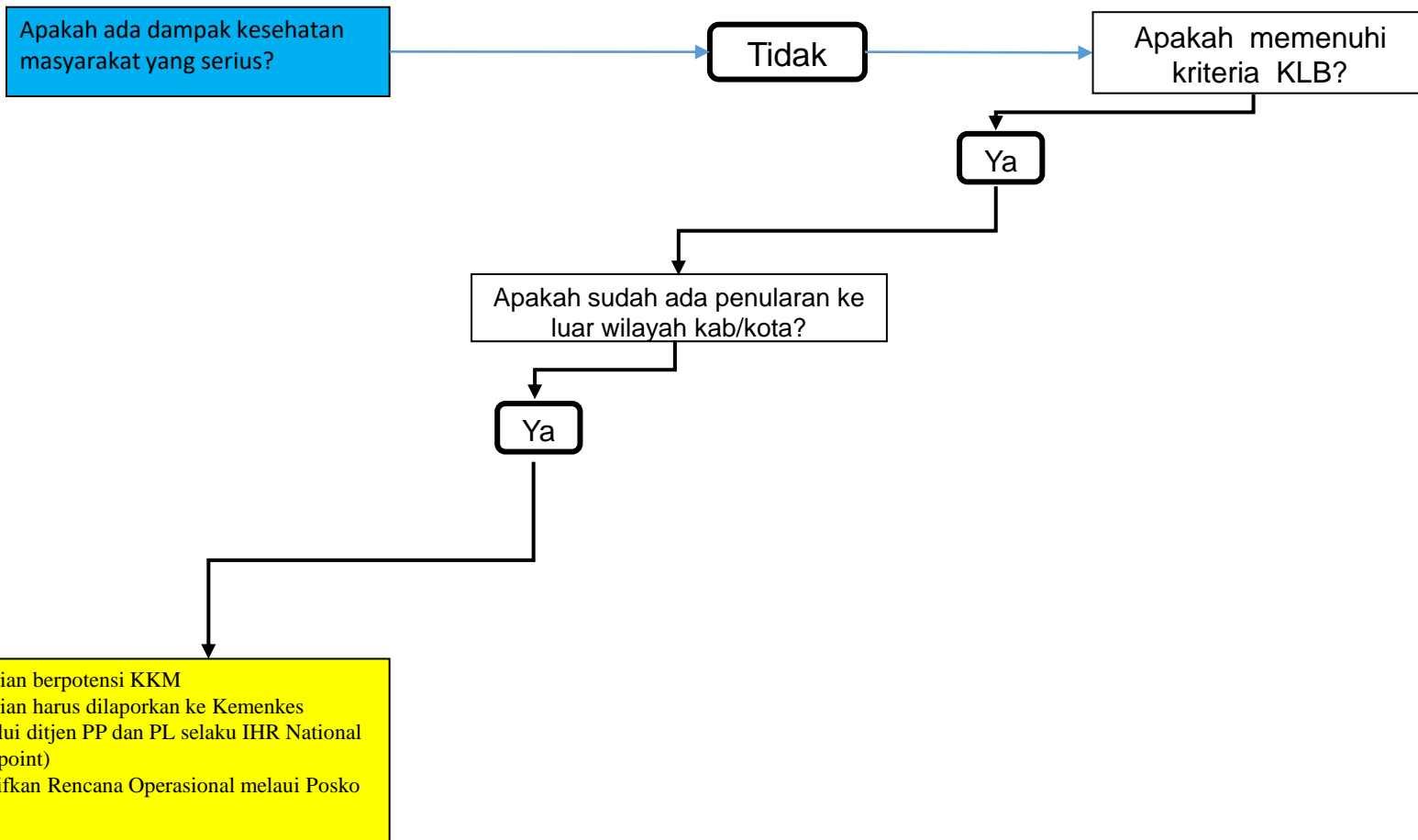
ALUR PENILAIAN KEJADIAN BERPOTENSI KKM (1)



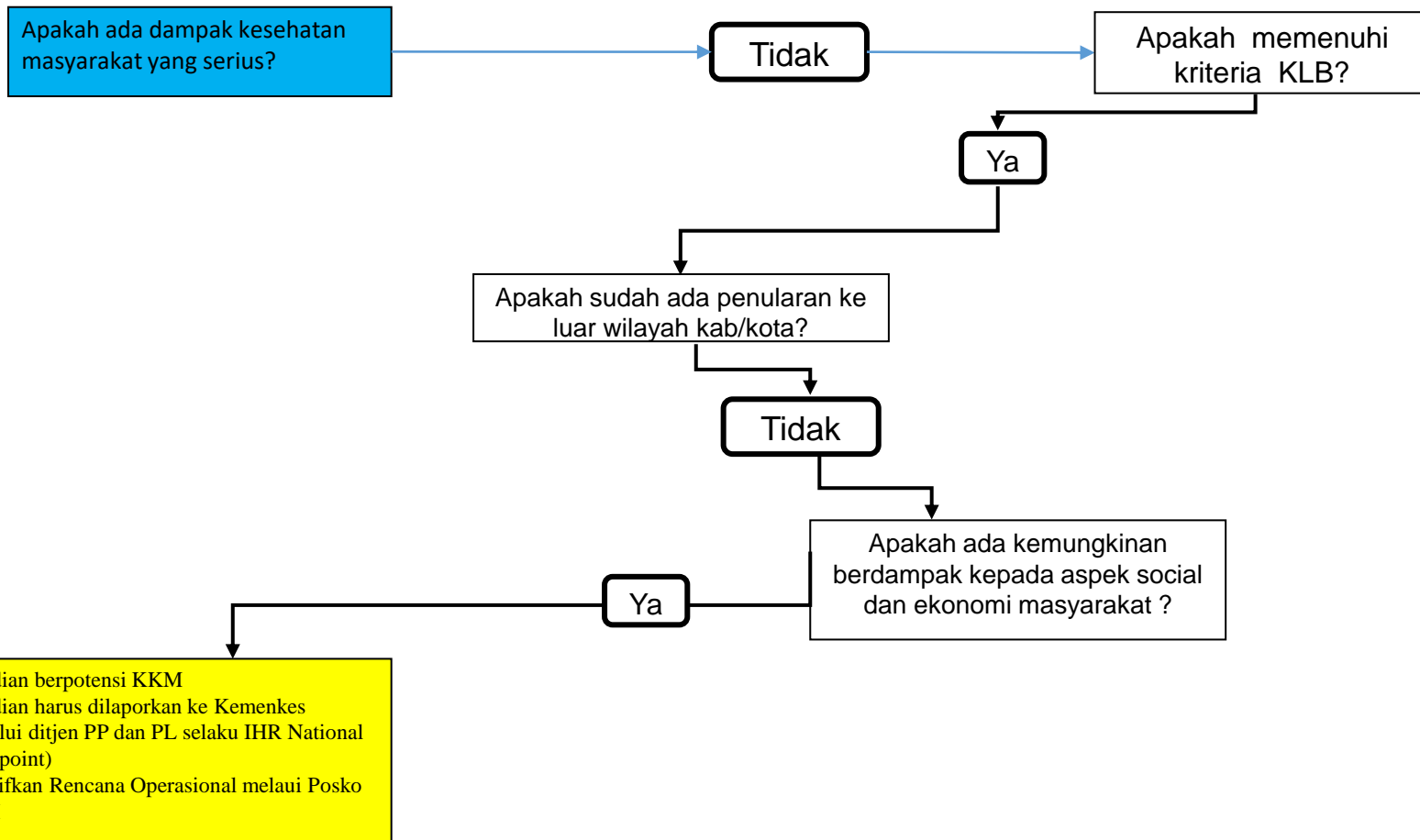
ALUR PENILAIAN KEJADIAN BERPOTENSI KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT



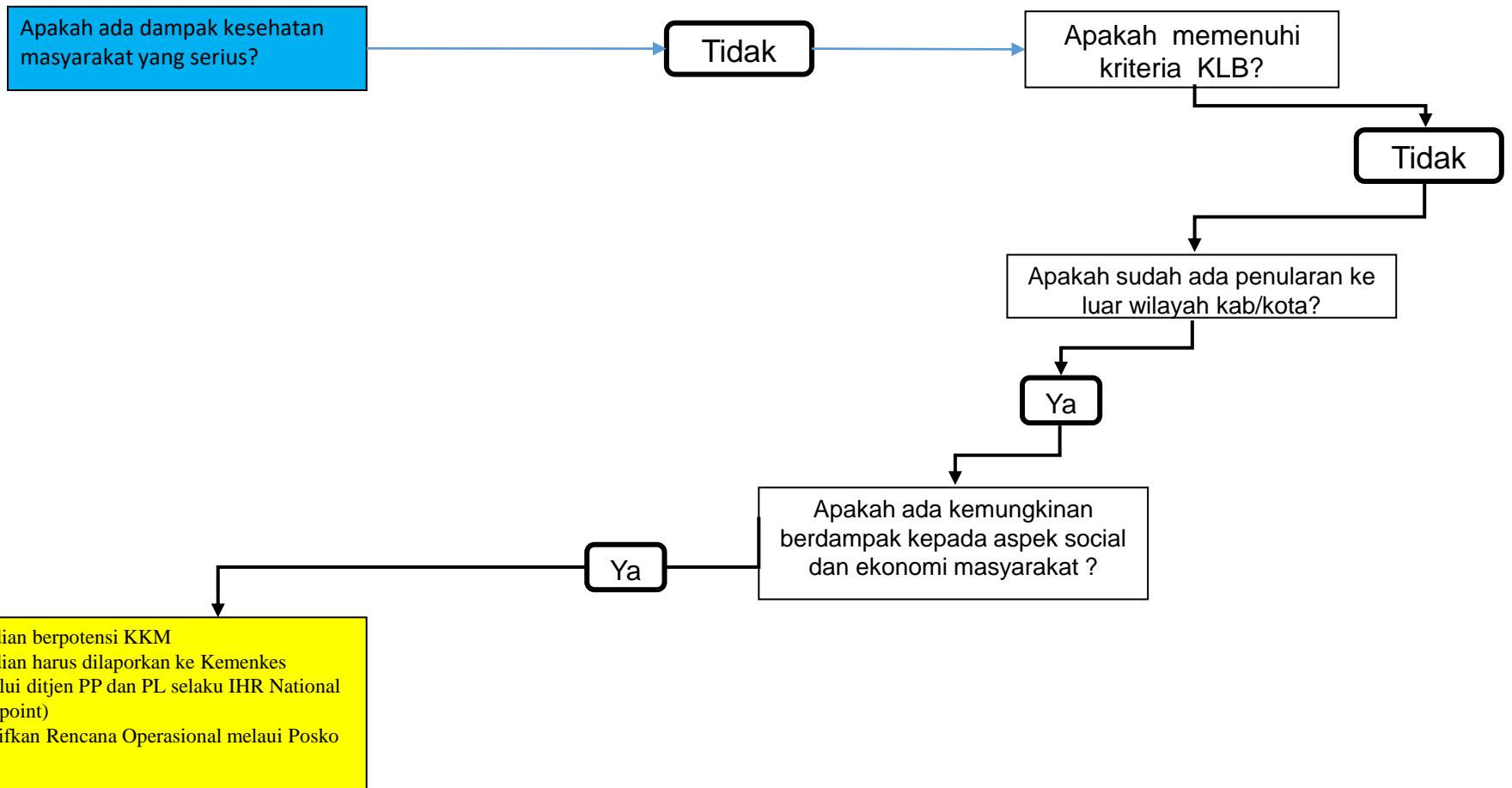
ALUR PENILAIAN KEJADIAN BERPOTENSI KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT



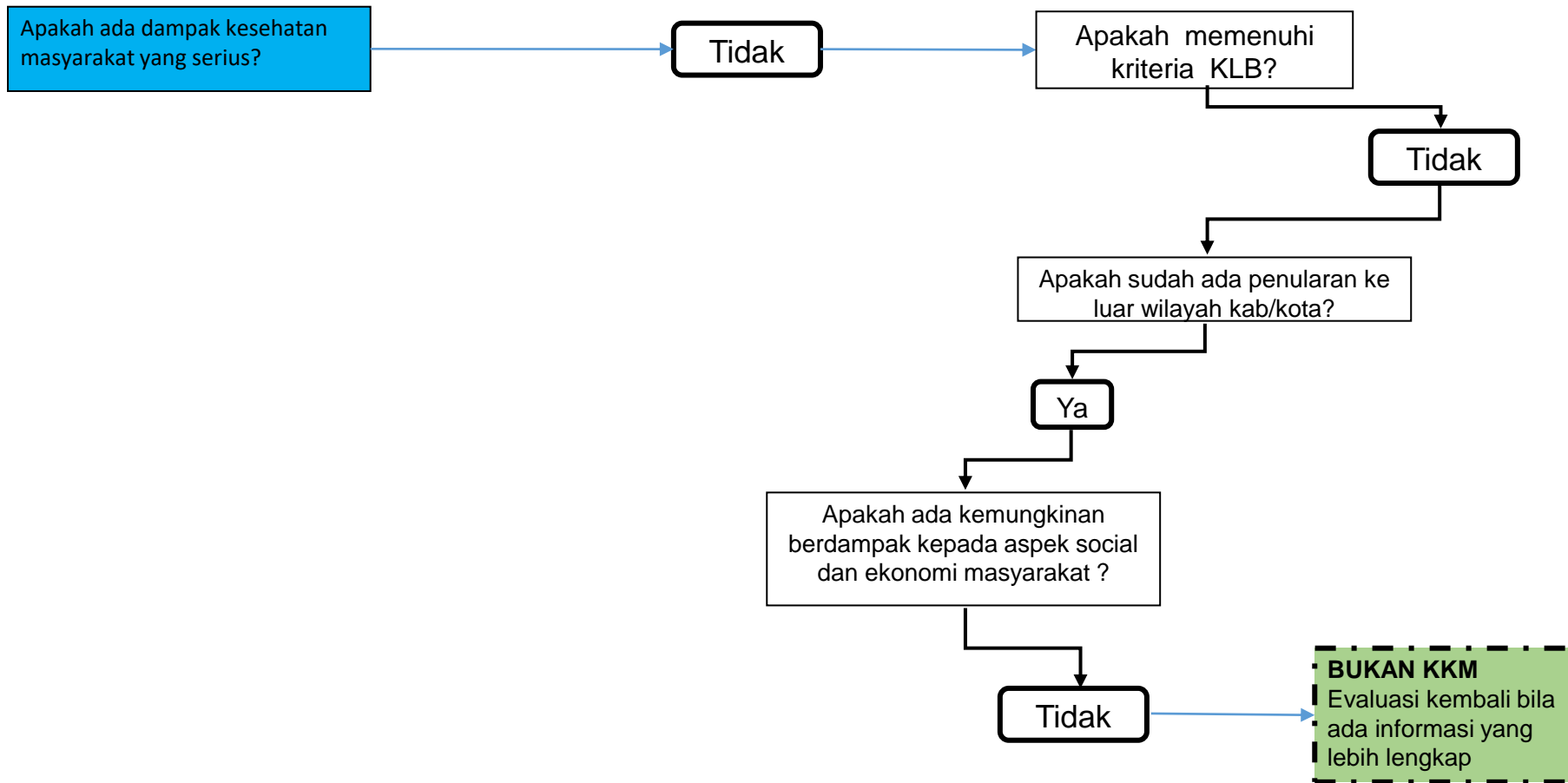
ALUR PENILAIAN KEJADIAN BERPOTENSI KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT



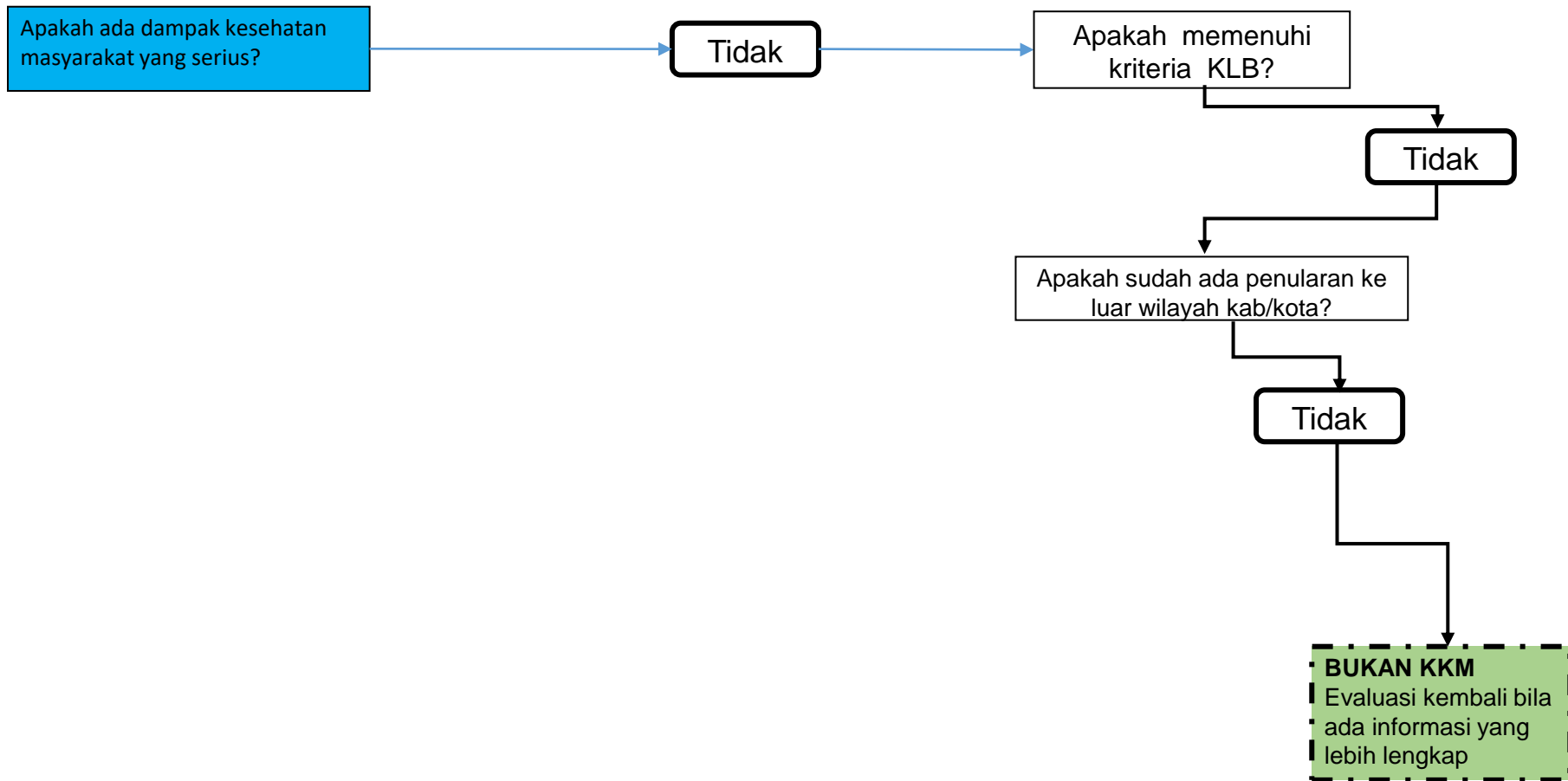
ALUR PENILAIAN KEJADIAN BERPOTENSI KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT



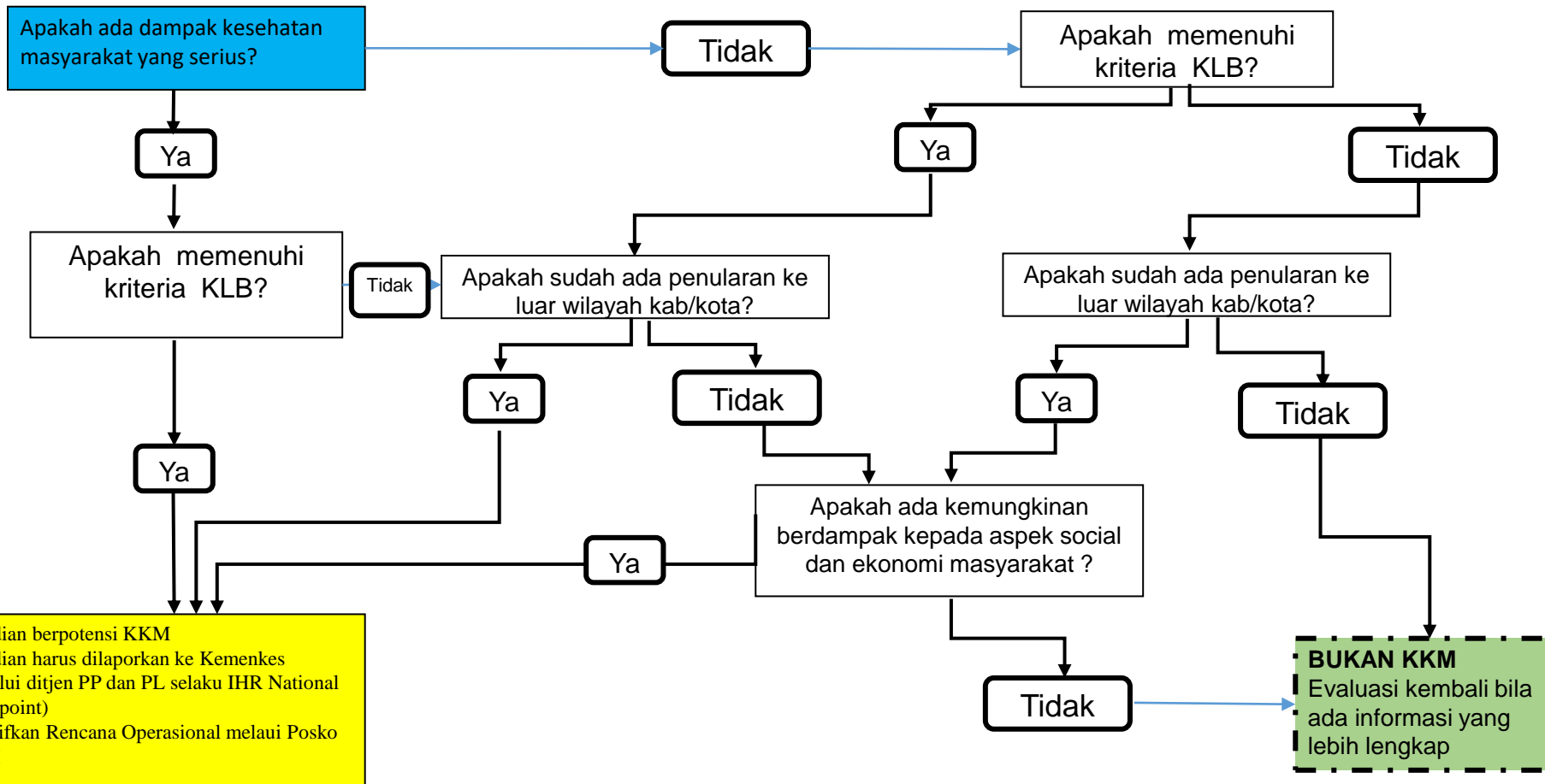
ALUR PENILAIAN KEJADIAN BERPOTENSI KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT



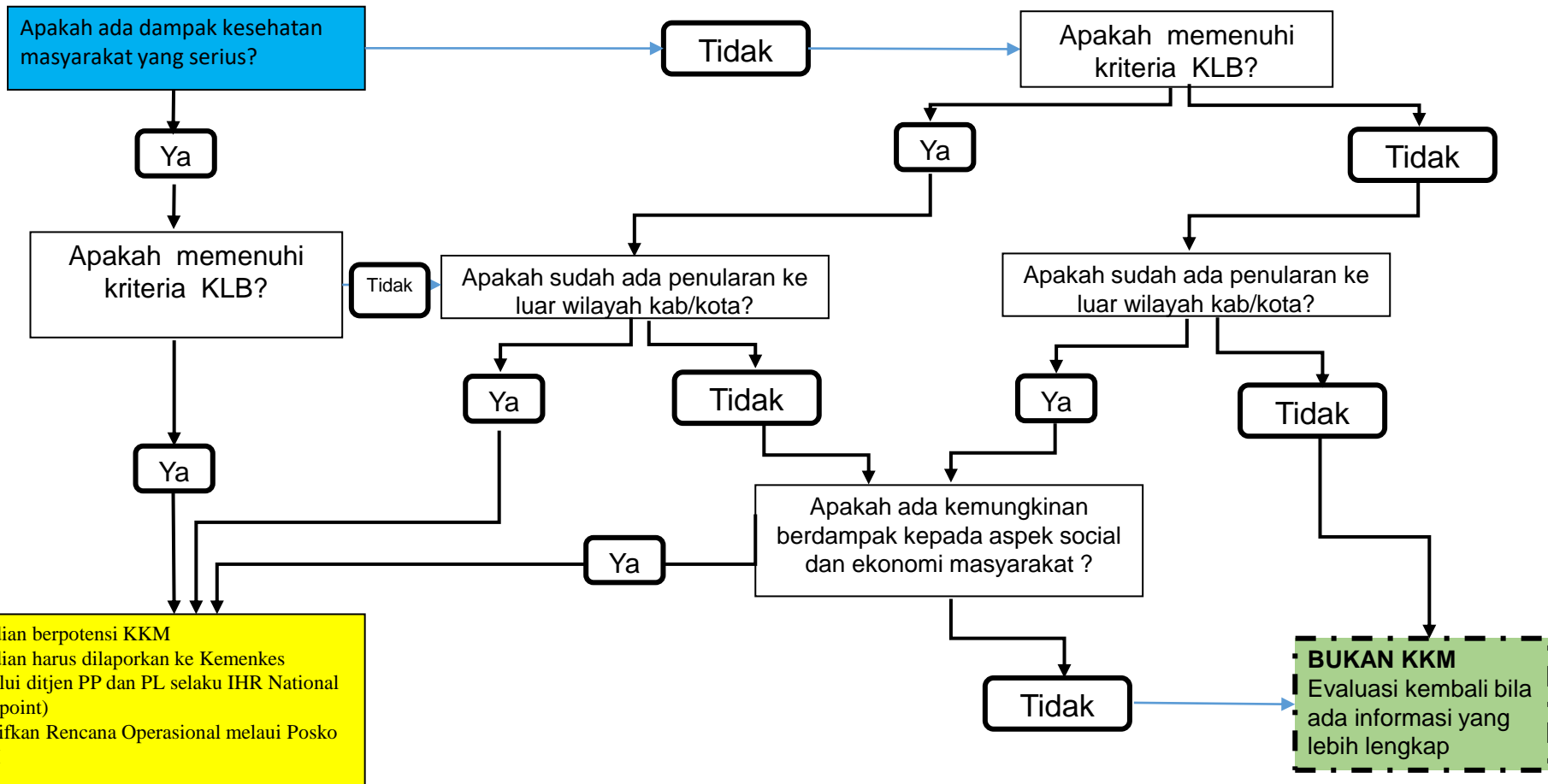
ALUR PENILAIAN KEJADIAN BERPOTENSI KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT



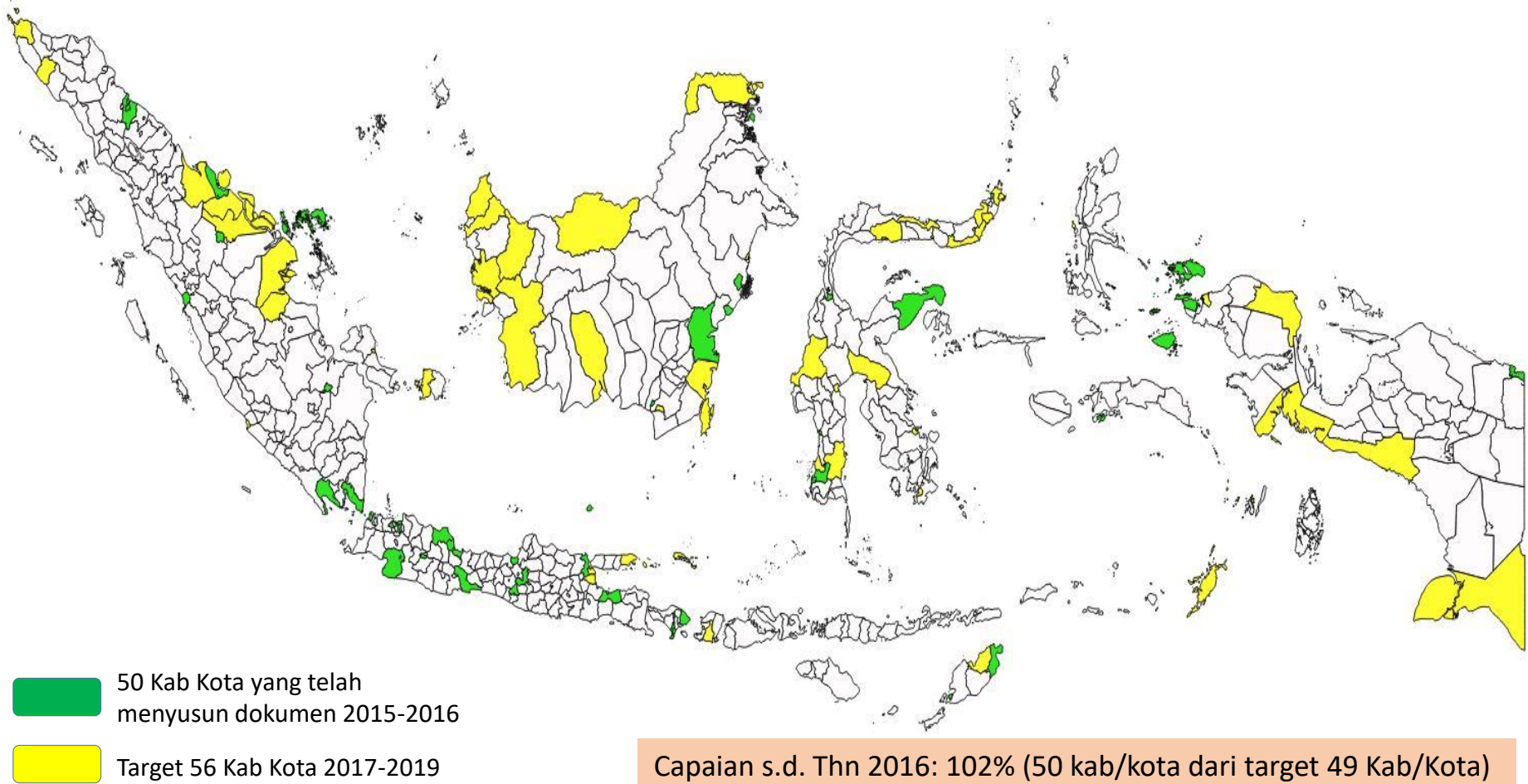
ALUR PENILAIAN KEJADIAN BERPOTENSI KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT



Alur Penilaian Kejadian Berpotensi KKM



Kab/Kota Mempunyai Kebijakan Penanggulangan KKM



Target & Kabupaten/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah 2015-2019

Daftar 50 Kab/Kota yang telah mempunyai dokumen Kebijakan KKM

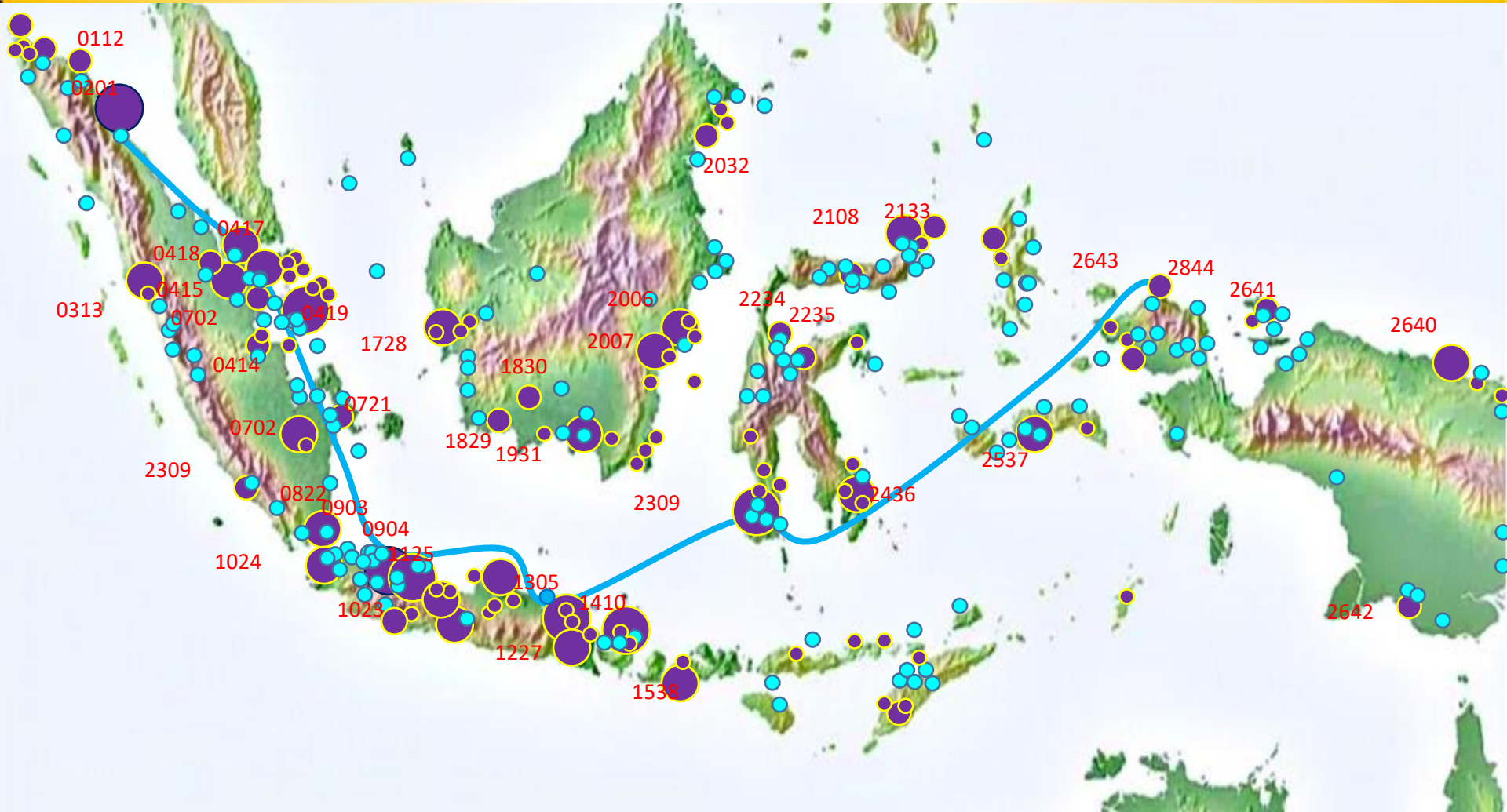
NO	PROVINSI	No	KABUPATEN / KOTA
1	BALI	1	KAB BADUNG
		2	KAB KARANGASEM
		3	KOTA DENPASAR
2	JAWA TIMUR	4	KAB GRESIK
		5	KAB PROBOLINGGO
3	SULAWESI SELATAN	6	KAB MAROS
		7	KOTA MAKASSAR
		8	KOTA PARE-PARE
4	KEPULAUAN RIAU	9	KOTA BATAM
		10	KOTA TG PINANG
		11	KAB BINTAN
		12	KOTA TANJUNG BALAI KARIMUN
5	KALIMANTAN SELATAN	13	KOTA BANJARMASIN
6	KALIMANTAN UTARA	14	KOTA TARAKAN
7	SUMATERA BARAT	15	KOTA PADANG
		16	KAB PADANG PARIAMAN
8	JAWA TENGAH	17	KOTA SEMARANG
		18	KAB BOYOLALI
		19	CILACAP
9	SUMATERA SELATAN	20	KOTA PALEMBANG
10	JAWA BARAT	21	KOTA BANDUNG
		22	KOTA CIREBON
		23	KAB INDRAMAYU
		24	KAB. CIREBON
		25	KAB SUKABUMI

NO	PROVINSI	No	KABUPATEN / KOTA
11	KALIMANTAN BARAT	26	KOTA PONTIANAK
12	LAMPUNG	27	KOTA BANDAR LAMPUNG
		28	KAB TANGGAMUS
13	RIAU	29	KAB. LAMPUNG SELATAN
		30	KOTA PEKANBARU
14	NUSA TENGGARA TIMUR	31	KOTA DUMAI
		32	KOTA KUPANG
15	PAPUA BARAT	33	KAB BELU
		34	KAB WAISAI
16	DKI JAKARTA	35	KOTA JAKARTA UTARA
		36	KOTA JAKARTA TIMUR
		37	KOTA MEDAN
17	SUMATERA UTARA	38	KOTA T. BALAI
		39	KAB DELI SERDANG
18	KALIMANTAN TIMUR	40	KOTA BALIKPAPAN
		41	KAB PASER
19	MALUKU	42	KOTA SAMARINDA
		43	KOTA AMBON
20	BANTEN	44	KOTA TANGERANG
		45	KOTA CILEGON
21	PAPUA	46	KOTA JAYAPURA
		47	KOTA PALU
23	SULAWESI TENGAH	48	KAB LUWUK
		49	KAB SLEMAN
24	DI YOGYAKARTA	50	KOTA MANADO



Target 56 Kab/Kota yang akan menyusun dokumen Kebijakan 2017 s.d. 2019

NO	PROVINSI	No	KABUPATEN / KOTA	NO	PROVINSI	No	KABUPATEN / KOTA
1	JAWA TIMUR	1	KOTA SURABAYA	16	MALUKU	30	KOTA TUAL
		2	KOTA SIDOARJO			31	KAB MALUKU TENGGARA BARAT
		3	KAB SUMENEP	17	PAPUA	32	KAB MIMIKA
2	SULAWESI SELATAN	4	KAB LUWUK TIMUR			33	KAB MERAUKE
		5	KAB PANGKEP	18	KALIMANTAN TENGAH	34	KAB KOTAWARINGIN TIMUR
		6	KOTA PALOPO	19	SULAWESI UTARA	35	KAB MINAHASA UTARA
		7	KAB BONE			36	KAB. MINAHASA SELATAN
4	KALIMANTAN SELATAN	8	KAB KOTABARU			37	KAB. MINAHASA TENGGARA
		9	KOTA BANJARBARU			38	KAB. B. MONGONDOW SELATAN
5	KALIMANTAN UTARA	10	KAB NUNUKAN			39	KOTA BITUNG
11	KALIMANTAN BARAT	11	KAB KUBU RAYA			40	KAB BOLAANG MANGONDOW TIMUR
		12	KAB SAMBAS	20	SULAWESI TENGGARA	41	KOTA BAU BAU
		13	KAB SANGGAU			42	KOTA KENDARI
		14	KAB KAPUAS HULU	21	NUSA TENGGARA BARAT	43	KAB LOMBOK TENGAH
		15	KAB BENGKAYANG	22	ACEH	44	KOTA BANDA ACEH
		16	KAB. KETAPANG			45	KOTA SABANG
12	RIAU	17	KAB TEMBILAHAN			46	ACEH BESAR
		18	KAB BENGKALIS			47	ACEH BARAT
		19	KAB ROKAN HILIR	23	BENGKULU	48	KOTA BENGKULU
		20	KAB KEPULAUAN MERANTI	24	GORONTALO	49	KOTA GORONTALO
		21	KAB SIAK			50	KAB GORONTALO UTARA
13	NUSA TENGGARA TIMUR	22	KAB MALAKA			51	KAB POHUWATO
		23	KAB TIMUR TENGAH UTARA	25	SULAWESI BARAT	52	KAB MAMUJU
14	PAPUA BARAT	24	KOTA SORONG	26	JAMBI	53	TANJUNG JABUNG BARAT
		25	KAB KAIMANA	27	MALUKU UTARA	54	KOTA TERNATE
		26	KAB MANOKWARI	28	BANGKA BELITUNG	55	KAB BELITUNG
15	KALIMANTAN TIMUR	27	KOTA BONTANG			56	KOTA PANGKAL PINANG
		28	KAB. KUTAI TIMUR (SANGATA)				
		29	KAB. BERAU				

Pintu Masuk Negara Mempunyai Rencana Kontinjensi Penanggulangan KKM s.d. Tahun 2016



s.d. Tahun 2016: 68 pintu masuk negara mempunyai rencana kontinjensi

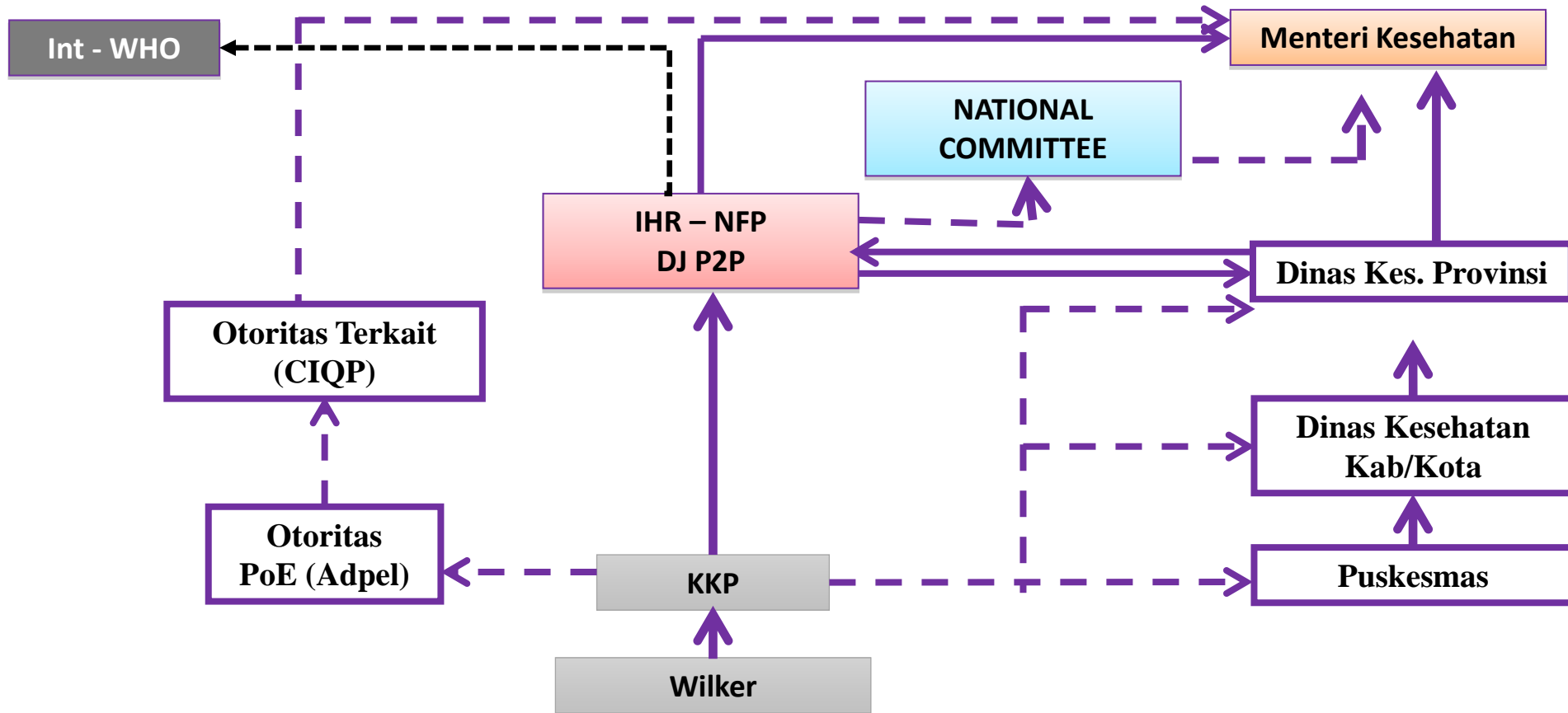
-  Pintu masuk negara dengan Renkon KKM → Seluruh pintu masuk utama mempunyai renkon
-  Pintu masuk negara

Catatan: Lokasi pintu masuk negara diatas as indicated

Pintu Masuk Negara Mempunyai Rencana Kontinjensi Penanggulangan KKM s.d. Mei 2017

NO	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	PINTU MASUK	NO	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	PINTU MASUK
1	BATAM	BANDARA INTERNASIONAL HANG NADIM	40		PELABUHAN LAUT BAU-BAU
2		PELABUHAN LAUT INTERNASIONAL SEKUPANG	41		PEL LAUT KOLAKA
3		PELABUHAN LAUT FERY HARBOUR BAY	42	KUPANG	POS LINTAS BATAS MOTAAIN
4	DENPASAR	DENPASAR (BANDARA NGURAH RAI)	43		PELABUHAN LAUT LABUAN BAJO
5		BANDARA JUANDA	44		PELABUHAN LAUT MAUMERE
6	MEDAN	MEDAN (PELABUHAN BELAWAN)	45		PELABUHAN LAUT ALOR
7		PELABUHAN LAUT TANJUNG BALAI ASAHAN	46		PELABUHAN LAUT TENAU
8		BANDARA KUALA NAMU	47	LHOKSEUMAWE	BANDARA MALIKUSSALEH
9	MAKASSAR	BANDARA HASSANUDIN	48	MANOKWARI	MANOKWARI (PELABUHAN LAUT MANOKWARI)
10		MAKASSAR (PELABUHAN LAUT MAKASSAR)	49	MANADO	MANADO (BANDARA SAM RATULANGI)
11		PELABUHAN LAUT PARE - PARE	50	MATARAM	BANDARA INTERNATIONAL LOMBOK
12		PELABUHAN LAUT BAJOE BONE	51		PELABUHAN LAUT LEMBAR
13	JAKARTA	CENKARENG (BANDARA SOKARNO HATTA)	52	MERAUKE	BANDARA INT MOPAH
14		BANDARA HALIM PERDANA KUSUMA	53	PADANG	PADANG (PELABUHAN LAUT TELUK BAYUR)
15	SURABAYA	SURABAYA(PELABUHAN LAUT TG PERAK	54	PALEMBANG	BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN I
16		BANDARA JUANDA	55	PALU	PALU (PELABUHAN LAUT PANTOLOAN)
17	TANJUNG PRIOK	TANJUNG PRIOK (PELABUHAN LAUT TG PRIOK)	56	PANJANG	PANJANG (PELABUHAN LAUT PANJANG)
18	AMBON	AMBON (PELABUHAN LAUT AMBON)	57	PEKANBARU	PEKANBARU (BANDARA SULTAN SYARIF KASIM II)
19	BALIKPAPAN	BALIKPAPAN(PELABUHAN LAUT BALIKPAPAN)	58	PONTIANAK	BANDARA SUPADIO
20		BANDARA SEPINGGAN	59		POS LINTAS BATAS ENTIKONG
21		PELABUHAN LAUT TANAH GROGOT	60	POSO	PELABUHAN LAUT AMPANA
22	BANDA ACEH	PELABUHAN LAUT MEULABOH	61	PROBOLINGGO	PELABUHAN LAUT TANJUNG WANGI
23		PELABUHAN LAUT ULEE LHEU	62	SAMARINDA	PEL LAUT SAMARINDA
24	BANDUNG	BANDUNG (BANDARA HUSEIN SASTRANEGARA)	63		PELABUHAN LAUT SANGATA
25		PELABUHAN LAUT BALONGAN	64	SABANG	PELABUHAN LAUT TELUK SABANG
26	BANJARMASIN	BANJARMASIN (PELABUHAN LAUT TRISAKTI)	65	SAMPIT	PELABUHAN LAUT SAMPIT
27		BANDARA SYAMSUDDIN NOOR	66	SEMARANG	SEMARANG (PELABUHAN LAUT TANJUNG MAS)
28		PEL LAUT KOTA BARU	67		BANDARA ACHMAD YANI
29	BANTEN	PELABUHAN LAUT MERAK	68		BANDARA ADI SUMARMO
30	BENGKULU	BENGKULU (PELABUHAN LAUT BAI)	69	SORONG	PELABUHAN LAUT SORONG
31	BIAK	BANDARA MOZES KILANGAN	70		PELABUHAN LAUT RAJA AMPAT
32		PELABUHAN LAUT BIAK	71	TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG (PELABUHAN LAUT TANJUNG PINANG)
33	BITUNG	BITUNG (PELABUHAN LAUT BITUNG)	72		PELABUHAN LAUT LAGOI
34	CILACAP	CILACAP (PELABUHAN LAUT TANJUNG INTAN)	73	TANJUNG BALAI KARIMUN	TANJUNG BALAI KARIMUN (PELABUHAN LAUT TANJUNG BALAI KARIMUN)
35	GORONTALO	GORONTALO (PELABUHAN LAUT GORONTALO)	74	TARAKAN	BANDARA INTERNATIONAL JUWATA TARAKAN
36	JAYAPURA	JAYAPURA (PELABUHAN LAUT JAYAPURA)	75	TEMBILAHAN	TEMBILAHAN (PELABUHAN LAUT TEMBILAHAN)
37		POS LINTAS BATAS SKOUW	76	TERNATE	PELABUHAN LAUT AHMAD YANI
38		BANDARA SENTANI	77	YOGYAKARTA	YOGYAKARTA (BANDARA ADI SUTJIPTO)
39	KENDARI	KENDARI (PELABUHAN LAUT KENDARI)			

Koordinasi dalam Penanggulangan



- Meningkatkan komunikasi risiko dan promosi kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media.
- Pemberitahuan berkala kepada Dinas Kesehatan dan RS tentang kesiapsiagaan sesuai perkembangan.

Koordinasi dalam Penanggulangan



Tim Gerak Cepat – KLB

- SOP
- *Alert core team*

- Dokter
- Epidemiolog
- Kes. Masyarakat
- Laboran
- *dll*

Rencana Kontijensi– KKM/Wabah

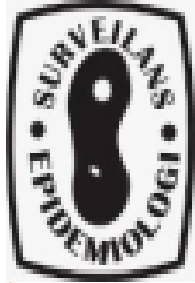
- Posko
- Multi sektor
- SOP
 - Kesehatan
 - Kesehatan Hewan
 - Penyuluh/pendamping masy
 - Transportasi
 - Logistik
 - Keamanan



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

PHEOC

Public Health Emergency Operations Center



Pusat operasional manajemen kedaruratan kesehatan masyarakat dalam mengumpulkan informasi terkait KLB/ wabah, menentukan keputusan prioritas dan melakukan koordinasi serta komunikasi yang diperlukan untuk respon dalam penanggulangan KLB/ wabah.

Dijalankan dengan menggunakan Incidence Management System (ICS) yaitu sistem untuk mendeteksi secara dini adanya gangguan atau ancaman penyakit yang berpotensi KLB.

Tujuan & Fungsi: Public Health Emergency Operation Center

• Tujuan

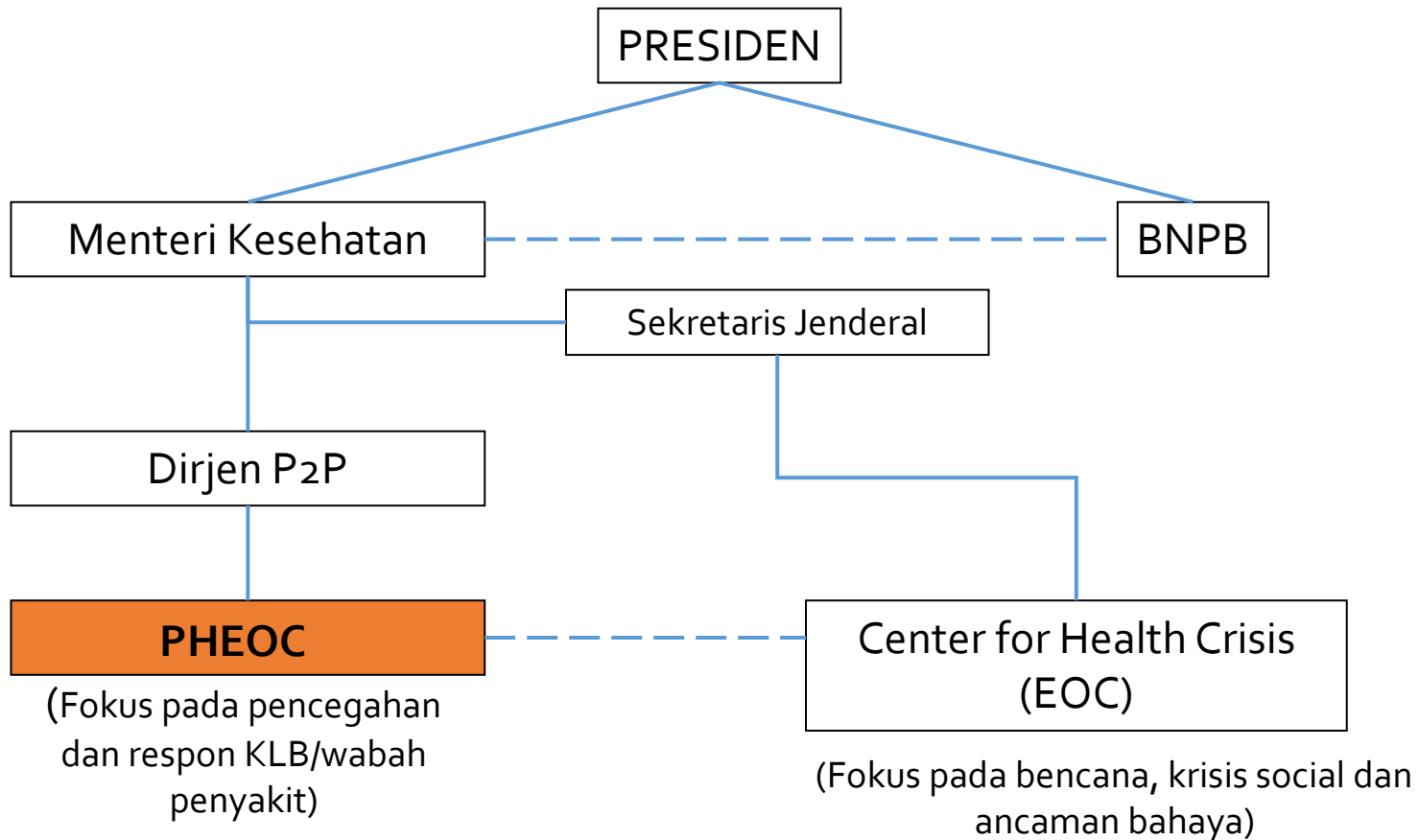
1. Memperkuat pelaksanaan detect, prevent dan response dalam menghadapi berbagai macam penyakit menular berpotensi wabah guna mencegah terjadinya KLB/ wabah;
2. Mendorong peningkatan kapasitas inti dalam pelaksanaan *International Health Regulation* (IHR, 2005) dan kapasitas pelaksanaan Global Health Security Agenda (GHSA)
3. Memfasilitasi *transfer of knowledge, information sharing* dan *capacity building* di tingkat

Fungsi

1. Melakukan deteksi dini, pencegahan, dan respon cepat munculnya penyakit menular berpotensi wabah agar tidak terjadi wabah/KLB atau public health emergencies of international concern (PHEIC)
2. Melaksanakan perencanaan dan identifikasi sumberdaya guna mendukung penanggulangan KLB/Wabah/PHEIC di tingkat Pusat/Kemenkes
3. Memperkuat jejaring kerja lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan KLB/Wabah/PHEIC
4. Meningkatkan kapasitas teknik laboratorium, kapasitas detect, prevent dan respond, serta kapasitas Tim Gerak Cepat, Penanggulangan KLB/Wabah/PHEIC di Pusat dan Daerah
5. Memperkuat implementasi surveilans kesehatan masyarakat di Pusat dan Daerah.



Organogram: Public Health Emergency Operation Center



Video:
Public Health Emergency Operation Center

Kontak & Hubungi: Public Health Emergency Operation Center

- Sms/whatsapp :
- +62 878 0678 3906 ; +62 812 1924 1850
- Call : +621 425 7125 ; +621 426 5974
- Email : poskoklb@gmail.com



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan

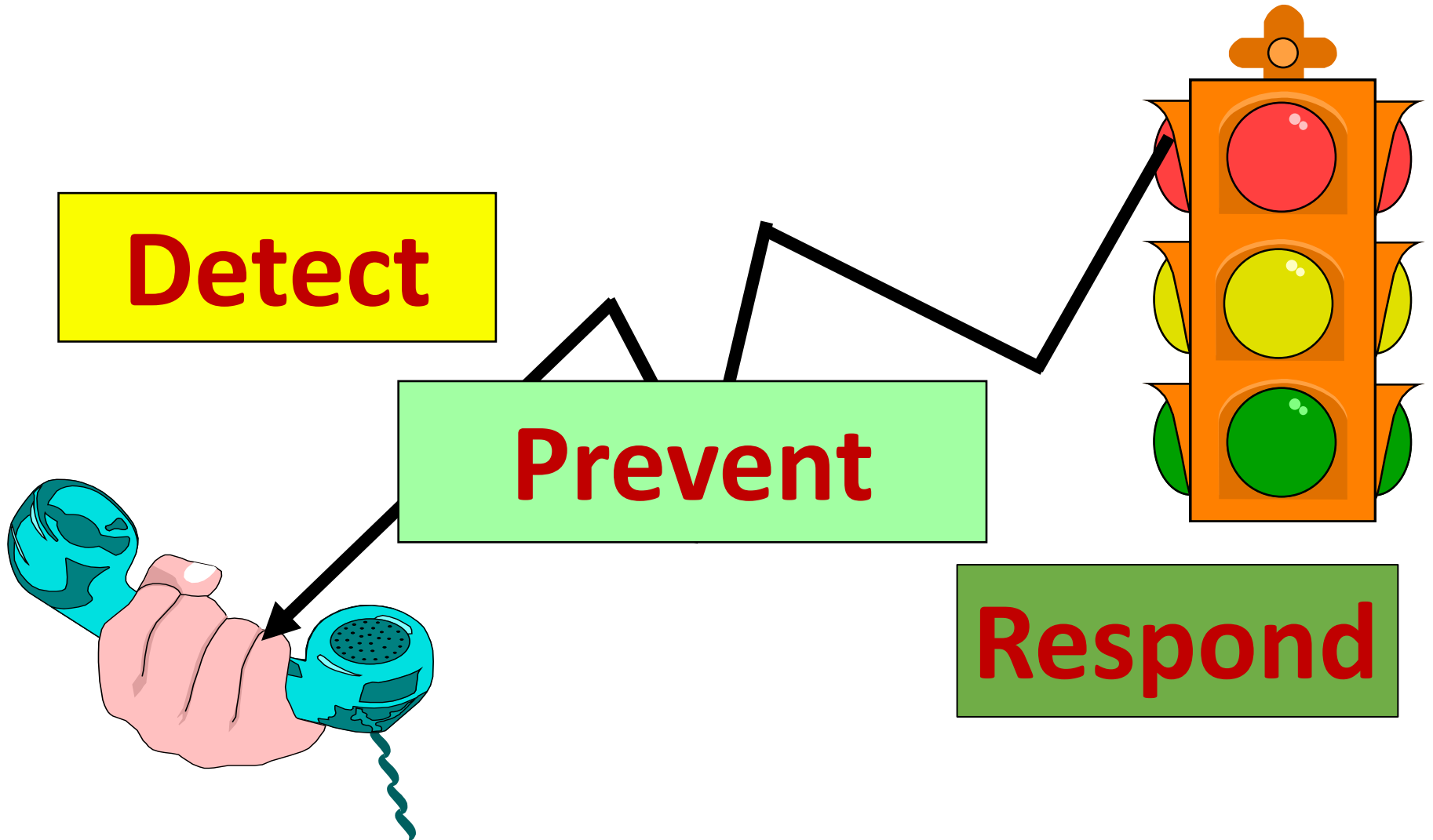
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Jl. Percetakan Negara No 29 Jakarta Pusat

Kegiatan dalam Peningkatan Kapasitas

1. Sosialisasi dan advokasi regulasi kesehatan internasional (2005) termasuk kapasitas inti IHR dan paket aksi keamanan kesehatan global
2. Penilaian pencapaian kapasitas inti IHR di pintu masuk negara, wilayah dan nasional dengan melibatkan lintas sektor terkait
3. Sosialisasi dan advokasi kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap faktor risiko kedaruratan kesehatan masyarakat dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lintas sektor
4. Workshop penyusunan dokumen kebijakan dan rencana kontijensi bagi stakeholder daerah
5. Penyusunan dokumen kebijakan (rencana kontijensi) termasuk di pintu masuk negara
6. Simulasi dan table top exercise rencan response kedaruratan kesehatan masyarakat
7. Review dan update dokumen kebijakan yang telah disusun baik di kab/kota maupun di pintu masuk negara

Kesimpulan



Terima Kasih